

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Oleh:

Azahra Wardani Edna Putri¹

Khosyi Qiyamulael²

Nur Laela Itsnaini³

Khalimatu Rofiah⁴

Sephia Dwi Astuti⁵

Zhafran Pradipta⁶

Universitas Gadjah Mada

Alamat: Bulaksumur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
(55281).

Korespondensi Penulis: azahrawardaniednaputri@mail.ugm.ac.id,
khosyiqiamulael@mail.ugm.ac.id, nurlaelaitsnaini@mail.ugm.ac.id,
khalimaturofiah@mail.ugm.ac.id, sephiadwiastuti@mail.ugm.ac.id,
zhafranpradipta@mail.ugm.ac.id.

Abstract. *The Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the conditional cash transfer programs implemented in Indonesia since 2007, primarily targeting poor and vulnerable households with at least one child enrolled in elementary, junior high, or senior high school. One of the main goals of PKH is to break the cycle of intergenerational poverty by improving access to basic services, particularly education. The PKH program continued until at least 2014, alongside the government's policy of enforcing nine years of compulsory education. Therefore, this study aims to examine the impact of the PKH program on access to nine years of compulsory education. The research method employed is Propensity Score Matching (PSM) using data from IFLS-5. The results indicate that PKH has a positive and statistically significant impact on access to nine*

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

years of compulsory education. Specifically, households receiving PKH have a 2.38% higher probability of gaining access to compulsory education. However, despite this positive effect, the magnitude of the impact remains relatively small. This suggests that PKH assistance is still largely allocated to fulfill basic or non-educational needs among beneficiary households in Indonesia.

Keywords: PKH, Compulsory Education, Cash Conditional Transfer, Propensity Score Matching.

Abstrak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan tunai bersyarat yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007, dengan sasaran utamanya yaitu keluarga miskin dan rentan miskin dengan salah satu komponen persyaratannya yaitu memiliki anak usia SD/SMP/SMA. Salah satu tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, salah satunya pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) masih terus berlanjut hingga tahun 2014, beriringan dengan kebijakan pemerintah menetapkan wajib belajar 9 tahun. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap akses kesempatan wajib belajar 9 tahun. Metode yang digunakan untuk mendukung penelitian yaitu *Propensity Score Matching* (PSM) dengan menggunakan data IFLS-5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berdampak positif secara signifikan terhadap akses wajib belajar 9 tahun dengan ketentuan bahwa Rumah Tangga Penerima PKH memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan akses wajib belajar 9 tahun sebesar 2,38%. Meskipun demikian, nilai dampak tersebut masih cukup kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi dana bantuan PKH bagi Rumah Tangga di Indonesia masih ditujukan oleh kebutuhan pokok atau non-pendidikan.

Kata Kunci: PKH, Wajib Belajar, Bantuan Tunai Bersyarat, *Propensity Score Matching*.

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah pondasi fundamental untuk membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, berkompeten, dan berbudi luhur. Dewi dan Indrayani (2021) mengatakan bahwa salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia adalah pendidikan. Kualitas sumber daya akan

terbentuk setelah mengalami proses pendidikan. Yuniarti dan Sukarniati (2021) beranggapan bahwa kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong kualitas pendidikan di Indonesia harus terus direalisasikan dengan efisien dan efektif agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah menggalakkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).



Grafik 1. Angka Partisipasi Sekolah Kelompok Umur 13-15 Tahun di Indonesia

Sumber : BPS Indonesia Diolah

Berdasarkan **Grafik 1.** Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 13-15 diatas, menunjukkan bahwa APS mengalami tren meningkat secara konsisten setiap tahun dari mulai 84,65 pada tahun 2007 menjadi 94,44 pada tahun 2014. Kenaikan paling tajam terjadi antara tahun 2013-2014, di mana APS melonjak dari 90,81 menjadi 94,44. Hal tersebut menjelaskan bahwa peserta didik yang mengakses pendidikan wajib belajar sembilan tahun selalu meningkat setiap tahunnya hingga 2014. Dengan begitu, terdapat perbaikan partisipasi atau akses pendidikan dari tahun ke tahun.

Kebijakan PKH di Indonesia mulai dilakukan pada sekitar tahun 2007 dengan landasan hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga prasejahtera dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi kewajiban tertentu. Melalui pendekatan ini, PKH tidak hanya bertindak sebagai bantuan keuangan, tetapi juga sebagai alat perubahan perilaku agar keluarga penerima lebih peduli terhadap aspek pendidikan dan kesehatan. PKH memiliki tujuan yaitu untuk peningkatan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

miskin. Salah satu tujuannya di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan partisipasi sekolah baik SD maupun SMP. PKH harus dapat memilah mana yang berada di luar sistem persekolahan untuk dapat meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun.

Dengan adanya bantuan dalam program ini maka diharapkan akses terhadap pendidikan terbuka lebar. Akan tetapi, seiring berjalannya kebijakan PKH ini, muncul kebutuhan untuk melakukan evaluasi sejauh mana program ini benar-benar berkontribusi terhadap bidang pendidikan yang salah satunya terhadap peningkatan kesempatan belajar sembilan tahun. Evaluasi program ini sangat penting dilakukan agar apa yang menjadi tujuan program dalam rangka meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun dapat diwujudkan dengan baik.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Wajib Belajar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Lama wajib belajar di Indonesia adalah 9 tahun, meliputi jenjang SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan nonformal.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua.

Landasan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang mempertegas pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun.

Penelitian terkait wajib belajar 9 tahun:

Hasbullah (2014) dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik* menemukan bahwa kebijakan wajib belajar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar. Faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program wajib belajar adalah kapasitas dan komitmen pemerintah daerah. Hal ini dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), bahwa Daerah dengan alokasi anggaran pendidikan yang tinggi cenderung memiliki capaian wajib belajar yang lebih baik dibandingkan daerah lain.

B. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan bantuan sosial bersyarat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan dengan mendorong akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Landasan hukum pelaksanaan PKH dapat ditelusuri melalui berbagai regulasi nasional yang saling memperkuat satu sama lain. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, PKH termasuk dalam strategi nasional sebagai program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

bersyarat kepada fakir miskin dalam bentuk uang atau barang, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bantuan seperti PKH yang bersifat tidak hanya karitatif, melainkan juga transformatif. Penjabaran lebih teknis mengenai pengertian dan pelaksanaan PKH dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, yang mendefinisikan PKH sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin dan rentan. Program ini mensyaratkan adanya pemenuhan komitmen tertentu oleh penerima bantuan, seperti menyekolahkan anak, membawa balita dan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, serta merawat anggota keluarga lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Dalam konteks konstitusi, keberadaan PKH juga sejalan dengan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, PKH tidak hanya merupakan instrumen bantuan sosial, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui pendekatan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan, termasuk melalui program bantuan sosial seperti PKH.

Penelitian terkait Program Keluarga Harapan

a) Sari dan Prasetyo (2020)

Dalam penelitian yang berjudul *The Impact of the Family Hope Program on Household Welfare*, Sari dan Prasetyo (2020) menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan fokus pada variabel

kesejahteraan dan pendapatan. Temuan menunjukkan bahwa PKH secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar bagi keluarga penerima manfaat.

b) Yulianti dan Setiawan (2021)

Yulianti dan Setiawan (2021) dalam penelitian mereka yang berjudul *Evaluating the Family Hope Program: Evidence from Indonesia* menilai efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan variabel yang berkaitan dengan kemiskinan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH terbukti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat, yang menunjukkan dampak positif program ini terhadap pengembangan sumber daya manusia.

c) Hidayah dan Indratno (2020)

Hidayah dan Indratno (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul *Program Keluarga Harapan dan Pembangunan Manusia* mengkaji pengaruh PKH terhadap pembangunan manusia di komunitas. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, dengan fokus pada variabel pendidikan dan kesehatan. Temuan menunjukkan bahwa PKH berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di kalangan keluarga penerima manfaat, sehingga memperkuat argumentasi bahwa program ini adalah salah satu strategi penting dalam pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *propensity score matching*, dengan menggunakan data indonesia melalui IFLS 5. *Propensity Score Matching (PSM)* merupakan suatu model penelitian dengan membandingkan hasil pengamatan terhadap dua kelompok *treatment* dan *non treatment*. Semakin dekat dengan garis tengah maka hasilnya semakin signifikan. Dalam mengestimasi skor kecenderungan, penelitian ini menggunakan model logit untuk melihat pengaruh variabel kontrol terhadap variabel *treatment*. Dalam penelitian ini yang dimaksud dalam variabel *treatment* yaitu penerima PKH dan *non treatment* yaitu masyarakat yang tidak menerima PKH. Variabel tersebut akan diuji dengan variabel *outcome* yaitu wajib belajar 9 tahun.

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Variabel Penelitian:

1. Variabel *Treatment*

PKH: Variabel *dummy* yang menunjukkan apakah rumah tangga menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Jika nilai variabel tersebut 1, maka rumah tangga tersebut adalah penerima PKH, dan jika nilainya 0, maka rumah tangga tersebut bukan penerima PKH

2. Variabel *Outcome*

Wajib belajar 9 tahun: Mengukur apakah penghuni dalam rumah tangga penerima PKH telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun.

3. Variabel Kovariat (Karakteristik Rumah Tangga)

- Akses Listrik: Variabel *dummy* dengan nilai 1 jika rumah tangga tersebut memiliki akses listrik, dan nilai 0 jika tidak memiliki akses Listrik.
- Akses Air Minum Bersih: Variabel *dummy* dengan nilai 1 jika rumah tangga tersebut memiliki akses air minum bersih, dan nilai 0 jika tidak memiliki akses air minum bersih.
- Status Kepemilikan Rumah: Variabel *dummy* dengan nilai 1 jika rumah tangga memiliki rumah sendiri, dan nilai 0 jika rumah tangga menumpang/sewa.
- Lokasi Tempat Tinggal: Variabel *dummy* dengan nilai 1 jika rumah tangga tersebut tinggal di perkotaan, dan nilai 0 jika tinggal di pedesaan.

Model Penelitian:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 Dumplace_i + \beta_2 X_i + u_i$$

Y	: Wajib belajar 9 tahun
Dumplace	: Dummy kategori rumah tangga penerima PKH
X	: Variable control (akses listrik, akses air minum bersih, status kepemilikan rumah, lokasi tempat tinggal)
β	: Koefisien regresi.
u	: Error

$$ATT = E(\Delta|P(X), D=1) = E(Y1|P(X), D=1) - E(Y0|P(X), D=0)$$

ATT : average treatment on treated. D=1: kelompok treatment.

D=0 : kelompok control.

Langkah-Langkah Analisis Propensity Score Matching:

- a. Menentukan variabel confounding, selanjutnya variabel confounding dinotasikan Z.
- b. Estimasi *propensity score* menggunakan regresi logistik dengan metode maximum likelihood estimation. *Propensity score* menggunakan model regresi logistik dengan variabel terikat adalah biner ($Z_i = 1$ untuk perlakuan dan $Z_i = 0$ untuk kontrol).
- c. Melakukan pencocokan (matching) dengan melihat daerah *common support* dan *balancing test*.
- d. Memeriksa common support kelompok treatment dan non treatment dan melihat distribusi saat dibandingkan.
- e. Melihat rata-rata PSM control dilakukan tes keseimbangan. Dengan begitu tingkat rata-rata perbedaan dalam kelompok treatment, yang biasanya disebut sebagai *average effect of treatment for the treated* (ATT) dapat ditemukan.
- f. Melakukan beberapa pengujian untuk mengukur kualitas pencocokan menggunakan t-test. Kualitas pencocokan dikatakan baik ketika nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari t table. Dengan kata lain semakin tinggi t hitung maka semakin baik juga pencocokannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Deskripsi data berikut bersumber dari data IFLS 5 yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini menunjukkan jumlah responden, persebarannya dan karakteristik variabel yang digunakan.

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

No	Variabel	Observasi	Mean	Std. Dev	Min	Max
1	Wb9tahun	15,377.00	0.03	0.17	0.00	1.00
2	Akses listrik	15,377.00	0.99	0.09	0.00	1.00
3	Air minum bersih	15,377.00	0.97	0.16	0.00	1.00
4	Kepemilikan rumah	15,377.00	0.74	0.44	0.00	1.00
5	Urban	15,377.00	0.59	0.49	0.00	1.00

Tabel 1. Deskripsi Statistik

Sumber: Data IFLS 5, diolah (2025)

Diketahui dari tabel diatas variabel dependen (outcome) adalah variabel Wb9tahun (Wajib belajar 9 tahun) yang artinya menjelaskan partisipasi anggota di dalam rumah tangga yang memenuhi program wajib belajar sembilan tahun. Variabel ini merupakan variabel dummy, dimana nilai 1 dapat diartikan bahwa anggota di dalam rumah tangga tersebut sudah memenuhi kewajiban tersebut, sedangkan nilai 0 menandakan keadaan sebaliknya. Dari hasil rata-rata menunjukkan nilai sebesar 0,03 yang artinya hanya 3% dari total responden yang memenuhi ketentuan tersebut.

Variabel dummy untuk akses terhadap listrik sebesar 0,99% artinya sebagian besar rumah tangga sudah mempunyai akses terhadap listrik dan sisanya hanya sebesar 0,09% rumah tangga yang belum memiliki akses listrik. Selanjutnya pada variabel dummy ketersediaan air minum bersih sebesar 0,97% yang menunjukkan hampir seluruh rumah tangga sudah memperoleh sumber air minum yang bersih dan layak. Pada variabel dummy kepemilikan rumah dengan nilai rata-rata sebesar 0,74% yang berarti rumah yang dihuni merupakan milik sendiri. Variabel dummy yang terakhir yaitu urban sebesar 0,59% dari total responden bertempat tinggal di wilayah perkotaan dan sisanya sebesar 0,49% tinggal di pedesaan.

No	Variabel	Keterangan	PKH		Jumlah
			Ya	Tidak	
1.	Akses Listrik	Tersambung	460	14,801	15,261
		Tidak tersambung	2	114	116
		Jumlah Observasi	462	15,261	15,377
2.	Air minum bersih	Sumber air minum utama (air mineral, ledeng, sumur pompa, sumur timba, mata air, air hujan)	453	14,528	14,981
		Air Sungai/kali, kolam, bak penampungan dan lainnya	9	387	396
		Jumlah Observasi	462	14,915	15,377
3.	Kepemilikan rumah	Status rumah milik sendiri	410	11,032	11,442
		Menempati, menyewa/kontrak dan lainnya	52	3,883	3,935
		Jumlah Observasi	462	14,915	15,377
4.	Urban	Perkotaan	220	8,898	9,118
		Pedesaan	242	6,017	6,259
		Jumlah Observasi	462	14,915	15,377

Tabel 2. Tabulasi Data

Sumber: Data IFLS 5, diolah (2025)

Berdasarkan tabel 2. total jumlah observasi adalah 15.377 orang dan sebanyak 460 orang penerima Program Keluarga Harapan (PKH), memiliki akses listrik yang memadai sedangkan yang tidak tersambung sebanyak 2 orang. Untuk air minum bersih sebanyak 453 orang sumber air minumnya sudah bersih dan layak hanya 9 orang yang belum terjamin kebersihannya. Dalam hal kepemilikan rumah, 410 orang penerima PKH status rumahnya sudah milik sendiri. Sementara 52 orang lainnya masih tinggal di rumah dengan status sewa. Jika dilihat dari tempat tinggalnya, sebanyak 220 penerima PKH bertempat tinggal di wilayah perkotaan, sementara 242 orang lainnya tinggal di pedesaan.

Pembahasan Hasil Estimasi Propensity Score Matching

A. Estimasi Model Logit

Pada Tabel 3. dapat diketahui bahwa status kepemilikan rumah (kepemilikanrumah_dummy) dan lokasi tempat tinggal (urban_dummy) merupakan variabel kovariat yang berpengaruh secara signifikan pada level 1% ($p < 0.01$) terhadap peluang Rumah Tangga di Indonesia untuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan, variabel kovariat lain yang terdiri dari akses listrik dan air minum bersih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peluang Rumah Tangga di Indonesia untuk menjadi penerima PKH. Variabel kovariat status kepemilikan rumah menunjukkan koefisien positif yang artinya Rumah Tangga yang telah memiliki rumah sendiri memiliki peluang lebih besar untuk menjadi penerima PKH. Sedangkan, variabel kovariat lokasi

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

tempat tinggal menunjukkan koefisien negatif yang artinya Rumah Tangga yang bertempat tinggal di desa memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi penerima PKH.

Variabel	Koefisien	Std. Error	P> Z
akseslistrik_dummy	0.655	0.7166	0.361
airminumbersih_dummy	0.478	0.3423	0.162
kepemilikanrumah_dummy	0.934***	0.1504	0.000
urban_dummy	-0.372***	0.0964	0.000
cons	-5.161***	0.7918	0.000
Observations	15,377		

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
 LR chi (4) = 77.45
 Prob > chi2 = 0.000
 Pseudo R2 = 0.0187
Keterangan:
 akseslistrik_dummy (1=mengonsumsi listrik) (0=tidak mengonsumsi listrik)
 airminumbersih_dummy (1=air mineral, air pipa, air pompa, air sumur) (0=air hujan, air sungai)
 kepemilikanrumah_dummy (1=rumah sendiri) (0=bukan rumah sendiri)
 urban_dummy (1=tinggal di perkotaan) (0=tinggal di pedesaan)
variabel treatment = PKH (1=penerima PKH) (0=bukan penerima PKH)
 Obs kelompok *treatment* (1) = 462
 Obs kelompok kontrol (0) = 14,915

Tabel 3. Hasil Regresi Logit untuk Estimasi P-Score

Sumber: Data IFLS 5, diolah (2025)

Secara simultan, keempat variabel kovariat atau prediktor yang digunakan dalam model logit dinilai signifikan secara statistik, hal tersebut dilihat dari nilai LR chi2 (77.45) dengan p-value (0.000). Kemudian nilai Pseudo R2 sebesar 0.0187 menunjukkan bahwa hanya sekitar 1.87% variasi dalam outcome dapat dijelaskan dalam pemodelan.

B. Menentukan Algoritma *Matching*

Pada **Tabel 4.** dapat diketahui bahwa hasil *matching* terbaik diperoleh melalui metode *NN without Replacement* yang menunjukkan besaran dampak 0.02389 dengan t-stat 2.08 dan *standard error* 0.01145 yang artinya variabilitas dalam estimasi rendah dan terdapat perbedaan rata-rata dampak secara signifikan antara kelompok perlakuan dan kontrol setelah dilakukan *matching*. Sedangkan, metode *NN with Replacement* menghasilkan nilai dampak sebesar -0.021 dengan nilai t-stat -0.10 dan *standard error* sebesar 0.218 yang menunjukkan tingginya variabilitas dalam estimasi dan tidak terbukti adanya perbedaan secara signifikan antara kelompok perlakuan dan kontrol setelah

matching. Kemudian, melalui metode *Radius Caliper* diperoleh nilai dampak sebesar 0.133 dengan *standard error* 0.009 dan *t-stat* 1.39 yang menunjukkan bahwa variabilitas estimasi rendah, namun perbedaan rata-rata dampak pada kelompok perlakuan dan kontrol belum cukup kuat. Metode terakhir yang digunakan yaitu *Kernel* yang menunjukkan nilai dampak sebesar -0.021 dengan *standard error* 0.218 dan *t-stat* -0.10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabilitas estimasi terbilang tinggi dan tidak ditemukan adanya bukti perbedaan rata-rata dampak antara kelompok perlakuan dan kontrol setelah *matching*.

Matching Method	Effect	S.E	t-stat
<i>NN with Replacement</i>	-0.021645	0.218908	-0.10
<i>NN without Replacement</i>	0.023809	0.011458	2.08
<i>Radius Caliper</i>	0.133202	0.009581	1.39
<i>Kernel</i>	-0.0216450	0.218908	-0.10

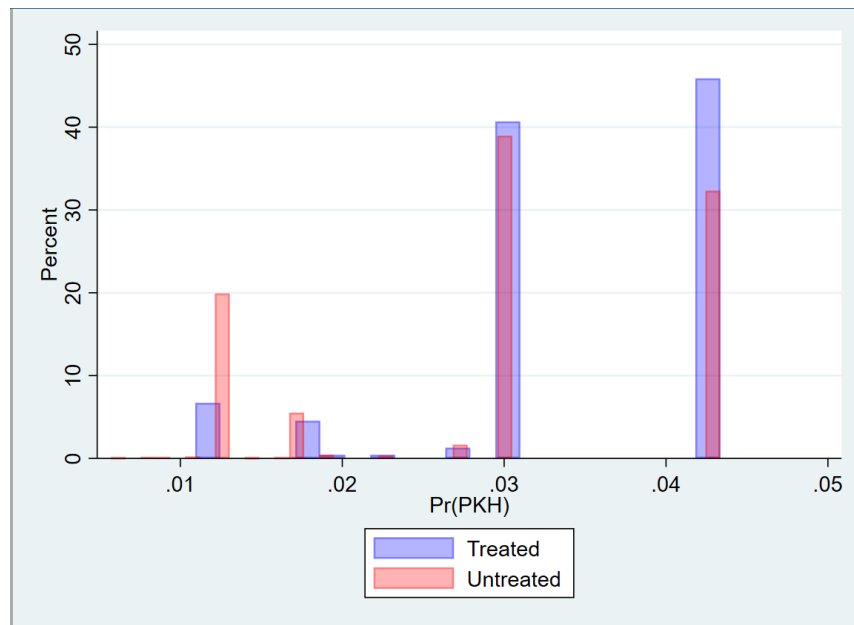
Tabel 4. Perbandingan Metode Matching

Sumber: Data IFLS 5, diolah (2025)

C. *Area of Common Support*

Berdasarkan **Grafik 2.** dapat diketahui bahwa terdapat perpotongan atau *overlap* antara kelompok perlakuan dan kontrol yang terbentuk dari *pscore* yang hampir mirip atau bahkan sama antara kelompok perlakuan dan kontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemodelan yang dirumuskan telah memenuhi asumsi dalam metode *Propensity Score Matching (PSM)* untuk menemukan ‘*best match*’ antara kelompok perlakuan dan kontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelompok perlakuan dan kontrol memiliki karakteristik yang mirip, sedangkan yang membedakan hanyalah status penerima PKH atau bukan selaku variabel *treatment*.

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA



Grafik 2. Histogram dari *Area of Common Support*

Sumber: Data IFLS 5, diolah (2025)

D. Evaluasi Matching

Nilai kualitas matching diukur menggunakan T-test melalui perintah pstest. Pencocokan dianggap berhasil jika terjadi penurunan standar bias dengan nilai p-value lebih dari 0,05 untuk semua variabel kontrol yang digunakan. P-value > 0.005 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok treatment dan kontrol yang artinya proses matching berhasil membuat kedua kelompok memiliki karakteristik yang mirip dan acak. Dengan demikian jika terjadi perbedaan hasil maka hal itu disebabkan oleh perlakuan yang dilakukan bukan karena perbedaan karakteristik variabel antara kedua kelompok.

Variabel	Ps-test bias standart			p-value	
	before match (%)	after match (%)	bias reduct (%)	before match	after match
Akses listrik	4.3	0.0	100.0	0.417	1.000
Air minum bersih	4.3	0.0	100.0	0.388	1.000
Kepemilikan rumah	38.6	0.0	100.0	0.000	1.000
Urban	-24.3	0.0	100.0	0.000	1.000

Tabel 3. T-test before and after matching

Sumber: Data IFLS 5, diolah (2025)

Pada tabel 3. menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai hasil bias yang lebih rendah setelah perlakuan matching. Nilai p-value setelah matching juga berada diatas tingkat signifikan yaitu > 0.005 yang artinya variabel treatment dan kontrol pada penelitian ini menunjukkan karakteristik yang mirip setelah matching dilakukan.

E. Analisis Sensitivitas

Gamma	p-value of Wilcoxon's signed rank		Hedges-Lehman point	
	Upper bound	Lower bound	Upper bound	Lower bound
1	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.1	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.2	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.3	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.4	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.5	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.6	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.7	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.8	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
1.9	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07
2	0	0	-4.6e-07	-4.6e-07

Tabel 4. Wb9tahun *Sensitivity Analysis*

Sumber: Data IFLS 5, diolah (2025)

Analisis sensitivitas digunakan untuk menguji apakah hasil Propersity Score Matching (PSM) dapat berubah jika terdapat faktor lain yang tidak masuk dalam model sehingga mempengaruhi peluang seseorang menerima PKH. Hasil tabel menunjukkan bahwa secara konsisten efek perlakuan terhadap variabel outcome (wb9tahun) nilainya sangat kecil yaitu -0.00000046. Selain itu tingkat nilai signifikan 0 yang mengindikasikan bahwa hasil akan tetap signifikan secara statistik meski terdapat perbedaan peluang perlakuan hingga dua kali lipat akibat faktor yang tersembunyi (Gamma = 2). Hal ini dapat disimpulkan bahwa program perlakuan PKH hampir tidak berpengaruh terhadap variabel wajib belajar 9 tahun dan kemungkinan perbedaan antara kelompok treatment dan kontrol disebabkan oleh faktor lain diluar model.

F. Evaluasi Dampak PKH

Berdasarkan algoritma *matching* pada bagian 4.2.2 dan evaluasi *matching* pada bagian 4.2.4 ditemukan bahwa metode *matching* terbaik pada pemodelan yaitu melalui

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP AKSES WAJIB BELAJAR BAGI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

NN without Replacement. Pada **Tabel 5**, dapat diketahui bahwa melalui metode matching tersebut, diperoleh nilai *difference* ATT sebesar 0.0238 yang mengindikasikan bahwa Rumah Tangga penerima PKH mengalami peningkatan kesempatan terhadap akses wajib belajar 9 tahun sebesar 2,38%.

Variable	Sample	Treated	Controls	Difference	S.E	T-stat
<i>wb9tahun_dummy</i>	Unmatched	0.043290043	0.029969829	0.0133320214	0.08106231	1.64
	ATT	0.043290043	0.019480519	0.023809524	0.011457461	2.08

Tabel 5. Nilai ATT dari Metode *Matching NN without Replacement*

Sumber: Data IFLS 5, diolah (2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan akses menempuh wajib belajar selama 9 tahun bagi Rumah Tangga di Indonesia sebesar 2.38%. Meskipun demikian, besaran nilai tersebut masih terbilang kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rumah Tangga di Indonesia masih berorientasi untuk menggunakan *cash-transfer* dari PKH bagi kebutuhan pokok atau non-pendidikan. Kemudian, faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap Rumah Tangga di Indonesia untuk menjadi sasaran atau penerima PKH yaitu status kepemilikan rumah dan lokasi tempat tinggal. Dengan ketentuan, Rumah Tangga yang memiliki rumah sendiri dan tinggal di kawasan pedesaan memiliki peluang yang lebih terbuka untuk menjadi penerima PKH.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya meliputi beberapa hal : 1) Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut alokasi penggunaan dana PKH oleh rumah tangga penerima, khususnya proporsi yang benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan anak. Penelitian kualitatif atau survei mendalam dapat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan rumah tangga dalam membelanjakan dana bantuan. 2) Memperluas variabel penelitian dengan memasukkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi efektivitas PKH terhadap pendidikan, seperti tingkat literasi orang tua, motivasi belajar anak, kualitas sekolah di lingkungan sekitar, serta peran pendamping PKH dalam mendorong pemanfaatan bantuan untuk pendidikan.

3) Menggunakan data longitudinal atau panel untuk melihat dampak jangka panjang PKH terhadap capaian pendidikan, tidak hanya terbatas pada akses wajib belajar sembilan tahun, tetapi juga pada keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan pencapaian prestasi akademik anak.

DAFTAR REFERENSI

- ACDP Indonesia. (2016). *Policy Review: Evaluasi Implementasi Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia*. Jakarta: ACDP.
- Dewi, P. Y. A., & Indrayani, L. (2021). Persepsi Orang Tua Siswa Terhadap Biaya Pendidikan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 69. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27034>
- Hasbullah. (2014). *Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun dan Dampaknya terhadap APK*. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*
- Hidayah, N. & Indratno, S. (2020). *Program Keluarga Harapan dan Pembangunan Manusia*. Bandung: *Jurnal Pembangunan Manusia*.
<https://bphn.go.id/data/documents/08pp047.pdf>
<https://www.journalofpoverty.org/>
<https://www.sciencedirect.coam/science/article/pii/S1877042815001573>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Wajib Belajar*. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008*.
- Sari, R. & Prasetyo, E. (2020). *The Impact of the Family Hope Program on Household Welfare*. Jakarta: *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Yulianti, D. & Setiawan, R. (2021). *Evaluating the Family Hope Program: Evidence from Indonesia*. Yogyakarta: *Indonesian Journal of Public Policy*.
- Yuniarti, D., & Sukarniati, L. (2021). Penuaan Petani dan Determinan Penambahan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian. *Jurnal Agroekonomika*, 10(1), 38-50. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1>